ISSN: 2809 - 6045 Volume 6 Nomor 2 Tahun 202

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BUMNAGORI BERBASIS APLIKASI PPAK BUMDES DI KECAMATAN BANDAR

[1)]Wico J Tarigan, [2)*]Sri Martina, [3)]Liharman Saragih, [4)]Djuli Sjafei Purba, [3)]Tuahman Sipayung, [4)]Elfina O P Damanik, [5)]Pandapotan Simatupang, [6)]Dian G Purba, [7)]Mahaitin H Sinaga, [8)]Johannes W P Purba, [9)]Christian Daniel Hermes, [10)]Romika Ambarita, [11)]Yuyun Indri Utami, [12)]Indah Sari Banjarnahor

[1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),11)] Universitas Simalungun
Email: srimartina999@gmail.com

ABSTRACT

Treasurers of village-owned enterprises need to translate cash records into accounting entries that can be traced to supporting documents and used in financial statements. This article describes a face-to-face technical training session at the Bandar District Office in Perdagangan, Simalungun Regency. The session was intended to reach Badan Usaha Milik Nagori (BUMNagori) treasurers from all 14 nagori in Bandar District. The training aimed to develop skills in transaction analysis, journal preparation using the General Cash Book, and use of the PPAK BUMDes accounting application. A descriptive review darew on activity photographs, planning documents, and public reporting about the training program. The session followed four stages: a lecture, a question-and-answer session, hands-on practice, and evaluation. The attendance register and individual evaluation records for the Bandar session were unavailable, so actual nagori representation and competency gains remain unverified. The article proposes comparing the attendance register with the list of target nagori and assessing participants on account selection, journal accuracy, traceability to supporting documents, and independent use of the application. These checks can inform follow-up coaching and help prepare financial statements for review before they are presented at a nagori assembly.

Keywords: Village - Owned Enterprises, Financial Reporting, Technical Training, PPAK BUMDes, accountability

ABSTRAK

Bendahara Badan Usaha Milik Nagori (BUMNagori) perlu mengolah catatan kas menjadi jurnal yang dapat ditelusuri ke bukti transaksi dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Artikel ini mendeskripsikan sesi bimbingan teknis tatap muka di Kantor Camat Bandar, Kota Perdagangan, Kabupaten Simalungun, dengan sasaran bendahara BUMNagori dari seluruh 14 nagori di Kecamatan Bandar. Kegiatan bertujuan membekali bendahara dengan keterampilan menganalisis transaksi, menyusun jurnal berdasarkan Buku Kas Umum, dan menggunakan aplikasi PPAK BUMDes. Telaah deskriptif mengacu pada foto kegiatan, dokumen persiapan, dan pemberitaan program. Kegiatan berlangsung dalam empat tahap, yaitu ceramah, tanya jawab, latihan, dan evaluasi. Daftar hadir sesi Bandar dan catatan evaluasi per peserta belum tersedia sehingga keterwakilan nagori dan perubahan keterampilan belum dapat diverifikasi. Artikel mengusulkan pencocokan daftar hadir dengan daftar nagori sasaran dan penggunaan tugas praktik untuk menilai ketepatan akun dan jurnal, keterlacakan bukti, serta kemandirian penggunaan aplikasi. Hasil penilaian dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pendampingan dan menelaah laporan keuangan sebelum disampaikan dalam Musyawarah Nagori.

Kata Kunci: BUMNagori, Laporan Keuangan, Bimbingan Teknis, PPAK BUMDes, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan tata kelola BUMNagori

Badan Usaha Milik Nagori (BUMNagori) mengelola kegiatan usaha dan aset yang perlu dipertanggungjawabkan kepada nagori. Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mewajibkan pelaksana operasional BUM Desa menyiapkan laporan semesteran dan tahunan. Laporan tahunan ditelaah oleh penasihat dan pengawas sebelum disampaikan kepada musyawarah desa atau musyawarah antardesa. Pada tingkat nagori, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi membantu peserta musyawarah memahami kondisi usaha, termasuk aset yang dikelola, kewajiban yang masih harus dipenuhi, dan hasil usaha selama satu periode (Republik Indonesia, 2021).

Bovens (2007) menjelaskan akuntabilitas sebagai hubungan antara pihak yang wajib memberi penjelasan atas tindakannya dan forum yang berwenang meminta keterangan serta menilai penjelasan tersebut. Dalam konteks BUMNagori, pelaksana operasional mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha dalam Musyawarah Nagori. Bendahara mendukung proses itu dengan menyediakan angka yang dapat ditelusuri ke bukti transaksi. Studi Yuliana dan Alinsari (2022) menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip tata kelola BUM Desa. Transparansi berkaitan dengan tersedianya informasi yang dapat dipahami, sedangkan akuntabilitas menuntut pengelola mampu menjelaskan dasar angka dan keputusan yang tercermin dalam laporan.

Pelaporan keuangan dan kualitas informasi

Salah satu keterampilan yang diperlukan untuk menyusun laporan adalah mengubah catatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) menjadi jurnal sesuai substansi transaksi. Setoran modal dan penerimaan hasil penjualan, misalnya, sama-sama menambah kas, tetapi memengaruhi akun lawan yang berbeda. Jika keduanya dicatat sebagai pendapatan, laporan akan melebihkan hasil usaha. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 memberikan panduan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi BUM Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2022).

Dalam pembukuan berpasangan, satu transaksi memengaruhi sedikitnya dua akun dan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Dalam pelaporan berbasis akrual, pengakuan transaksi mengikuti substansi peristiwa dan kriteria akun yang terkait. Sebagai contoh, penjualan kredit yang memenuhi kriteria pengakuan pendapatan menimbulkan piutang walaupun kas belum diterima. Karena itu, bendahara perlu melengkapi BKU dengan bukti dan catatan pendukung sebelum menyusun jurnal dan menelaah saldo akhir periode (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2022).

Model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) membedakan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Dalam konteks PPAK BUMDes, kualitas informasi dapat ditelaah melalui ketepatan akun dan nominal serta keterlacakan angka ke dokumen sumber. Penggunaan aplikasi dapat diamati dari kemampuan memasukkan jurnal serta menghasilkan keluaran secara mandiri. Manfaat dalam pekerjaan rutin perlu ditelaah setelah bendahara menerapkan aplikasi untuk menutup satu periode pembukuan.

Saragih et al. (2023) mendokumentasikan pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMNag Maju Bersama dari penjurnalan hingga pelaporan. Dalam studi pengabdian lain, Lestari et al. (2025) menunjukkan bagaimana aplikasi akuntansi berbasis lembar kerja membantu menghubungkan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Kedua pengalaman tersebut menunjukkan perlunya latihan membaca bukti transaksi,

memilih akun, dan menelaah keluaran aplikasi sebagai bagian dari proses yang sama.

Pembelajaran berbasis pengalaman

Morris (2020) menekankan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman bertumpu pada tugas yang sesuai dengan konteks peserta, refleksi atas proses pengerjaan, pemahaman konsep, dan penerapan pada situasi baru. Dalam pelatihan BUMNagori, prinsip ini dapat diterapkan dengan meminta bendahara menganalisis bukti transaksi, menjelaskan alasan pemilihan akun, memperbaiki jurnal setelah menerima umpan balik, lalu mengerjakan kasus setara secara mandiri. Rangkaian tugas tersebut memberi dasar untuk menilai kemampuan menerapkan konsep yang dipelajari.

Bimbingan teknis di Kantor Camat Bandar, Kota Perdagangan, bertujuan membimbing bendahara BUMNagori dari seluruh nagori di Kecamatan Bandar dalam menganalisis transaksi, menyusun jurnal berdasarkan BKU, dan menggunakan PPAK BUMDes untuk mendukung pelaporan. Artikel ini mendeskripsikan pelaksanaan sesi Bandar dan merumuskan indikator untuk menilai keterwakilan nagori serta keterampilan bendahara setelah pelatihan.

METODE

Sasaran dan pelaksanaan kegiatan

Sesi tatap muka bertempat di Kantor Camat Bandar, Kota Perdagangan, Kabupaten Simalungun. Sasaran pendampingan adalah bendahara BUMNagori dari seluruh 14 nagori di Kecamatan Bandar. Data wilayah dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029 mencatat 14 nagori dan dua kelurahan di Kecamatan Bandar (Pemerintah Kabupaten Simalungun, 2025). jadwal DPMN (2025) mencantumkan 14 bendahara dari Kecamatan Bandar.

Persiapan menjadwalkan sesi di Kantor Camat Bandar pada 5 November 2025, sedangkan liputan pelaksanaan mencatat rentang 10–20 November 2025 untuk sesi tatap muka tingkat kabupaten (DPMN Kabupaten Simalungun, 2025; Anita & Saragih, 2025). Tanggal pelaksanaan khusus sesi Bandar perlu dikonfirmasi melalui berita acara atau daftar hadir.

Tahapan pelaksanaan Bimtek

Sesi tatap muka dilaksanakan dalam empat tahap. Rancangan program juga mencakup materi tentang pengarsipan bukti belanja, pengadaan barang dan jasa, dan pertanggungjawaban di Musyawarah Nagori (DPMN Kabupaten Simalungun, 2025; Anita & Saragih, 2025).

1. Ceramah. Narasumber memaparkan dasar akuntansi, analisis transaksi, penyusunan laporan keuangan BUMNagori, dan pengenalan aplikasi PPAK BUMDes.
2. Tanya jawab. Setelah pemaparan, peserta mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi pemilihan akun dan penerapan materi pada transaksi BUMNagori.
3. Latihan. Peserta berlatih menganalisis contoh transaksi, menyusun jurnal berdasarkan Buku Kas Umum (BKU), dan memasukkan jurnal ke aplikasi PPAK BUMDes.
4. Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan setelah latihan untuk meninjau pemahaman peserta dan pelaksanaan tugas praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kantor Camat Bandar merupakan salah satu lokasi tatap muka dalam program Bimtek Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun. Tim dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun mendukung program sebagai narasumber simulasi dan praktik (Anita & Saragih, 2025). Sesi Bandar diarahkan untuk menjangkau bendahara BUMNagori dari seluruh nagori di kecamatan. Daftar hadir diperlukan untuk mengetahui jumlah bendahara yang mengikuti sesi dan nagori yang terwakili.

Gambar 1 memperlihatkan pemaparan dan spanduk yang memuat tema serta jadwal umum program. Gambar 2 memperlihatkan peserta menggunakan laptop dalam rangkaian Bimtek. Penggunaan perangkat mendukung latihan memasukkan jurnal ke aplikasi. Ketepatan entri dan kemandirian peserta dapat

dinilai melalui berkas jurnal serta keluaran aplikasi.



Gambar 1: Pemaparan pada Bimtek pelaporan keuangan BUMNagori
Sumber: Dokumentasi kegiatan (2025)



Gambar 2: Peserta menggunakan laptop pada sesi tatap muka
Sumber: Dokumentasi kegiatan (2025).

Foto bersama pada Gambar 3 melengkapi dokumentasi rangkaian Bimtek. Untuk mengukur keterwakilan di sesi Bandar, panitia dapat merekap setiap nagori satu kali berdasarkan asal bendahara pada daftar hadir dan menelusuri nagori yang masih memerlukan pendampingan.



Gambar 3: Foto bersama peserta dan pihak yang terlibat dalam Bimtek
Sumber: Dokumentasi kegiatan (2025)

Evaluasi dilaksanakan pada akhir sesi Bandar. Catatan hasil evaluasi dan hasil latihan per peserta belum tersedia untuk dianalisis. Dengan data yang tersedia, jumlah peserta yang menuntaskan latihan serta perubahan keterampilan belum dapat dihitung

Pembahasan

Tanya jawab setelah ceramah membantu memperjelas alasan pemilihan akun sebelum peserta menerapkan konsep tersebut pada latihan. Evaluasi setelah latihan memberi kesempatan untuk meninjau ketepatan pencatatan. Satu jurnal dapat seimbang secara aritmetis meskipun akun yang dipilih keliru. Pemeriksaan jurnal perlu mencakup substansi transaksi, kesesuaian tanggal dan periode, serta hubungan dengan bukti yang mendasarinya.Sebagai contoh ilustratif, penerimaan setoran modal sebesar Rp. 5.000.000 dicatat sebagai debit kas dan kredit akun penyertaan modal, dengan asumsi setoran telah diterima dan didukung dokumen yang sah. Ilustrasi ini menunjukkan cara membaca substansi transaksi sebelum memasukkan data ke PPAK BUMDes. Setelah input, bendahara dapat membandingkan saldo kas pada aplikasi dengan catatan kas atau rekening dan menelusuri selisih hingga ke transaksi asal. Ketika referensi bukti dicatat secara

konsisten, pengawas dapat menelusuri dasar angka yang disajikan pada laporan.

Pengalaman Novianty et al. (2024) di Sariwangi mengaitkan pelatihan berbasis lembar kerja dengan kebutuhan pelaporan yang mengikuti proses bisnis unit usaha. Saragih et al. (2023) memperlihatkan pentingnya keterkaitan pencatatan dan forum pertanggungjawaban pada BUMNag Maju Bersama. Tarigan et al. (2026) mendokumentasikan penggunaan PPAK BUMDes melalui simulasi dan praktik di Kantor Camat Tanah Jawa. Untuk sesi Bandar, tugas praktik yang seragam dapat membantu fasilitator mengenali kesalahan klasifikasi dan menentukan nagori yang memerlukan pendampingan tambahan.

Tabel 1 menyajikan usulan indikator untuk mendokumentasikan evaluasi dengan tugas praktik setara bagi peserta di Kecamatan Bandar. Indikator mencakup analisis transaksi hingga kemampuan menelusuri bukti saat laporan ditelaah.

Tabel 1. Indikator Evaluasi Dan Bukti Yang Diperlukan

Aspek yang dinilai	Indikator dan bukti yang diperiksa
Analisis transaksi	Akun dan alasan pemilihan sesuai substansi transaksi pada lembar kasus.
Jurnal dari BKU	Tanggal, akun, nominal, serta debit dan kredit tepat pada jurnal hasil praktik.
Penggunaan PPAK BUMDes	Peserta menginput jurnal dan menghasilkan keluaran untuk periode latihan secara mandiri.
Jejak bukti	Nomor bukti pada jurnal dapat ditelusuri ke dokumen sumber yang sesuai.
Telaah laporan	Peserta merekonsiliasi saldo kas dan menjelaskan sumber selisih pada lembar pemeriksaan.

Indikator pada Tabel 1 menghubungkan teori dengan tugas evaluasi. Keterlacakan bukti mendukung pertanggungjawaban kepada pengawas (Bovens, 2007). Ketepatan keluaran dan input mandiri mencerminkan kualitas informasi dan penggunaan aplikasi (DeLone & McLean, 2003). Setelah menerima umpan balik, peserta dapat mengerjakan kasus setara untuk menunjukkan penerapan konsep secara mandiri (Morris, 2020).

Fasilitator dapat menggunakan skala 0–2 untuk tiap indikator. Skor 0 diberikan jika tugas keliru atau belum selesai, skor 1 jika benar dengan bantuan, dan skor 2 jika benar secara mandiri. Tugas awal dan akhir sebaiknya memiliki tingkat kesulitan setara. Perubahan skor dihitung pada peserta dengan dua hasil penilaian yang dapat dipasangkan. Rekap penilaian memuat asal nagori dan jumlah peserta dengan data lengkap untuk membantu penentuan tindak lanjut.

Pendampingan dapat dilanjutkan pada penutupan satu periode pembukuan. Bendahara menyiapkan laporan dengan data unit usahanya, sedangkan fasilitator dan pengawas memeriksa kecocokan saldo, kelengkapan bukti, serta kejelasan penjelasan atas perubahan posisi keuangan dan hasil usaha. Tahap tersebut membantu mengukur apakah latihan dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin dan apakah laporan siap ditelaah sebelum Musyawarah Nagori.

SIMPULAN

Bimbingan teknis di Kantor Camat Bandar, Kota Perdagangan, ditujukan kepada bendahara BUMNagori dari seluruh 14 nagori di Kecamatan Bandar. Materi praktik mencakup analisis transaksi, penjurnalan berdasarkan BKU, dan penggunaan PPAK BUMDes. Daftar hadir dibuat sebagai kehadiran keterwakilan nagori, sedangkan uji praktik dan telaah laporan pada akhir periode pembukuan digunakan untuk menilai penerapan materi dan kebutuhan pendampingan lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, DPMN Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kecamatan Bandar, tim dosen Fakultas

Ekonomi Universitas Simalungun, narasumber, panitia, dan bendahara BUMNagori atas dukungan dan partisipasi dalam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anita, & Saragih, I. H. R. (2025, 21 November). Simalungun percepat digitalisasi BUMNagori lewat pelatihan aplikasi PPAK BUMDes. Mistar.id.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. DOI 10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30. DOI 10.1080/07421222.2003.11045748

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun. (2025). Permohonan narasumber bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan BUMNagori

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. JDIH Kemendesa

Lestari, S. A., Raodah, S., Sari, S. M., Hamdayani, S., & Martiningsih, R. S. P. (2025). Peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa dalam penyusunan laporan keuangan melalui pelatihan aplikasi akuntansi BUMDesa. Jurnal Abdimas Sangkabira, 5(2), 391–401. DOI 10.29303/abdimassangkabira.v5i2.2117

Morris, T. H. (2020). Experiential learning – a systematic review and revision of Kolb's model. Interactive Learning Environments, 28(8), 1064–1077. DOI 10.1080/10494820.2019.1570279

Novianty, I., Setiawan, I., Burhany, D. I., Aprilliawati, Y., Sembiring, E. E., Rohendi, H.,Mulyandani, V. C., Afriady, A., & Nurmalina, R. (2024). Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sariwangi dengan menggunakan aplikasi Excel sederhana. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 5(4), 4185–4193. DOI 10.55338/jpkmn.v5i4.3866

Pemerintah Kabupaten Simalungun. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025–2029. RPJMD Kabupaten Simalungun

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan.go.id

Saragih, L., Sinaga, M. H., Parinduri, T., Sinurat, A., Damanik, E. O. P., Girsang, R. M., Tarigan, W. J., Sipayung, T., Purba, D. S., & Martina, S. (2023). Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMNAG Maju Bersama. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, 3(2), 76–88. DOI 10.36985/jyd5wa41

Tarigan, W. J., Martina, S., Purba, D. S., Saragih, L., Sinaga, M. H., Sipayung, T., Damanik, E. O. P., Nainggolan, R. M., Tambak, D. G. P., Girsang, C. I., Hermes, C. D., Purba, J. W. P., Sitepu, I., Nurfadila, N., Gultom, M. V., Ambarita, R., Sijabat, S. A., & Br Sitepu, Y. L. (2026). Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMNagori melalui aplikasi PPAK BUMDes di Kantor Camat Tanah Jawa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei, 6(1), 108–117. DOI 10.36985/h9bn7f05

Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan tata kelola badan usaha milik desa dalam mewujudkan Sustainable Development Goals desa. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 2919–2929. DOI 10.33395/owner.v6i3.945